

TESIS

**PA'JABBA DAN PA'BUNGKA: AKSES NELAYAN DAN
KONSEKUENSI PEMANFAATAN SUMBER DAYA PERIKANAN
DI DANAU TEMPE SULAWESI SELATAN**

Disusun dan diajukan oleh :

IAN TUBANGSA

E042182002



PROGRAM PASCASARJANA ANTROPOLOGI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2021

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

PA'JABBA DAN PA'BUNGKA: AKSES NELAYAN DAN KONSEKUENSI PEMANFAATAN SUMBER DAYA PERIKANAN DI DANAU TEMPE SULAWESI SELATAN

Disusun dan diajukan oleh

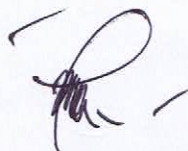
IAN TUBANGSA

E042182002

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Magister Program Studi Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin pada tanggal **13 Januari 2021** dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

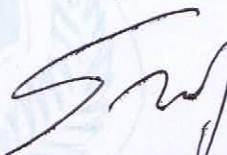
Pembimbing Utama,



Prof. Dr. Pawennari Hijjang, MA.

Nip. 19591231 198609 1 002

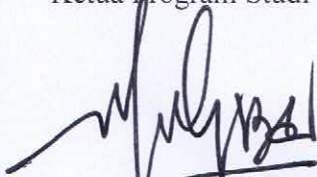
Pembimbing Pendamping



Dr. Safriadi, S.IP/M.Si.

Nip.19740605 200812 1 001

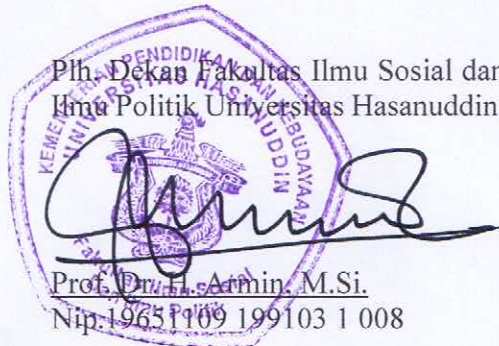
Ketua Program Studi Antropologi,



Dr. Muhammad Basir, MA.

Nip. 19620624 198702 1 001

Plh. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Hasanuddin,



Prof. Dr. H. Armin, M.Si.

Nip.19651109 199103 1 008

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : IAN TUBANGSA
NIM : E042182002
Program Studi : Antropologi
Jenjang : S2

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul

“Pa’jabba dan Pa’bungka: Akses Nelayan dan Konsekuensi Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan di Danau Tempe Sulawesi Selatan”

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambilan alihan tulisan orang lain bahwa Tesis yang saya tulis ini benar benar merupakan karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan Tesis ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut

Makassar, 20 Januari 2021

Yang Menyatakan,



IAN TUBANGSA

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrohiim.

Alhamdulillah, Puji Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Subhana Wa Ta'ala, karena berkat rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat merampungkan penyusunan tesis ini yang berjudul "*Pa'jabba dan Pa'bungka: Akses Nelayan dan Konsekuensi Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan di Danau Tempe Sulawesi Selatan*".

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa sejak persiapan dan proses penelitian hingga pelaporan tesis ini terdapat banyak kesulitan dan hambatan yang dihadapi, namun atas kemauan dan ketekunan serta bantuan dari berbagai pihak maka segala sesuatunya dapat diatasi. Untuk itu penulis menghaturkan banyak terima kasih yang tulus kepada Ibunda Salamang MS. yang telah memberikan segala bentuk motivasi, doa restu, dan pengorbanan kepada penulis agar penulis dapat menempuh pendidikan yang setinggi-tingginya seperti saat ini. Semoga Allah Yang Maha Kuasa memberi perlindungan, kesehatan dan pahala yang berlipat ganda atas segala kebaikan yang dicurahkan Beliau selama ini.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang teristimewa penulis haturkan kepada keluarga besar Alm. La Masse dan Hj. Sakka' termasuk Ny. Suhada S.Pd, keempat orang adikku serta sepupu juga paman dan bibi yang telah membantu dan menjadi penyemangat dalam mengiringi langkah penulis untuk meraih masa depan.

Penulis juga tidak lupa menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Basir, M.A., selaku Ketua Program Studi Magister Antropologi Universitas Hasanuddin. Beliau sangat bijak dan baik dalam memberikan arahan dan masukan dalam mempermudah segala pengurusan di kampus.
2. Bapak Prof. Dr. Pawennari Hijjang, M.A, pembimbing utama yang banyak meluangkan waktunya untuk penulis dalam membimbing penulisan tesis ini dari awal sampai akhir. Terima kasih atas kesabarannya dalam membimbing Prof.
3. Bapak Dr. Safriadi, M.Si, selaku pembimbing kedua yang sangat ramah dan mau membagi ilmunya kepada penulis. Terima kasih atas masukan dan waktunya untuk berdiskusi Pak.
4. Bapak Prof. Dr. Mungsi Lampe, M.A, selaku Penguji I yang sangat antusias memberkan saran dan masukan. Terima kasih telah menghargai dan memberikan apresiasi atas tulisan ini Prof.
5. Bapak Prof. Dr. Ansar Arifin, MS., selaku penguji II yang telah memberikan masukan-masukan yang bermanfaat bagi penulisan tesis ini.
6. Bapak Dr. Tasrifin Tahara, M.Si, selaku penguji III yang telah memberi kritik yang membangun dan menunjang perbaikan tesis ini.
7. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Antopologi, Universitas Hasanuddin yang telah membekali penulis segala pengetahuan selama berkuliah sampai pada penyusunan tesis ini. Dan Staff Fisip Unhas terkhusus Pak Irman, Bu Ira, dan Pak Nadir terima kasih banyak.

8. Kepada seluruh informan yang telah mendukung pelaksanaan penelitian ini. Pihak dinas perikanan (Pak Ambas), nelayan (Pak jodding, Pak Ciwang, Pak Mayong, Macoa'e, dan seluruh pihak yang terlibat dalam melancarkan proses penelitian di lapangan.
9. Kepada teman-teman yang telah membantu selama proses penelitian, Kak Azry, Mail, dan Fitrah terima kasih atas bantuannya.
10. Saudara-saudariku seangkatan, mahasiswa pascasarjana Antropologi Unhas. Kak Hafez, Kak Ria, Wahyu, Nunu, Lukman, Kak Tono, Kak Ani, Kak Askar, dan Izal yang telah menjadi teman diskusi dan berbagi. Terima kasih atas bantuan kalian semua selama ini.
11. Terkhusus bagi Adlillah Triastuti yang telah mendampingi dan mengingatkan segala kekurangan penulis. Terima kasih telah bersabar dan selalu mendukung.

Juga ucapan terima kasih kepada pihak yang tidak sempat saya sebutkan satu per satu. Akhirnya semoga tesis ini dapat bermanfaat dan bernilai pahala bagi para pembacanya. Aamiin.

Makassar, Januari 2021

Penulis

ABSTRAK

IAN TUBANGSA. *Pa'jabba dan Pa'bungka: Akses Nelayan dan Konsekuensi Sumber Daya Perikanan di Danau Tempe Sulawesi Selatan*, (dibimbing oleh Pawennari Hijjang dan Safriadi).

Penelitian ini bertujuan menggambarkan proses akses antara *pa'jabba* dan *pa'bungka* dalam memanfaatkan sumber daya perikanan, faktor yang mempengaruhi praktik tersebut, dan konsekuensi pemanfaatan sumber daya perikanan terhadap lingkungan dan sosial budaya di Danau Tempe.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penentuan informan dilakukan dengan metode *snowball*. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (*indept intevieiw*), observasi partisipan, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk akses *pa'jabba* berupa akses terhadap kawasa tangkap, kepemilikan alat tangkap, modal, akses pasar, dan bantuan pemerintah. Mekanisme yang digunakan *pa'jabba* antara lain kerja sama dengan pemilik kawasan tangkap, relasi dengan pihak otoritas, relasi dengan pemodal, relasi dengan pelaku pasar, identitas sosial, dan bergabung ke dalam kelompok nelayan. Adapun, bentuk akses *pa'bungka* meliputi: akses penguasaan kawasan tangkap, pemodal, akses pasar, tenaga kerja, dan akses lahan. Mekanisme akses *pa'bungka* meliputi akumulasi keuntungan yang besar, izin pemerintah, identitas ketokohan, dan relasi dengan berbagai pihak seperti pihak otoritas hingga hubungan patronase dengan nelayan lainnya. Akses nelayan dipengaruhi oleh peraturan, nilai dan kepercayaan, jaringan sosial, dan wacana moral. Konsekuensi lingkungan pemanfaatan sumber daya perikanan berupa menurunnya populasi ikan dan pendangkalan perairan danau. Adapun, konsekuensi sosial budaya berupa kesenjangan sosial, perubahan sistem kelembagaan sosial, memudarnya nilai kearifan lokal, dan perubahan pola pikir nelayan.

Kata Kunci: *pa'jabba*, *pa'bungka*, akses, konsekuensi, sumber daya perikanan.



ABSTRACT

IAN TUBANGSA. *Pa'jabba and Pa'bungka: Fisherman Access and Consequences of Fishery Resources Utilization in Lake Tempe South Sulawesi*, (supervised by **Pawennari Hijang and Safriadi**).

This study aims to determine the access process between *pa'jabba* and *pa'bungka* in utilizing of fishery resources, the factors that influence these practices, as well as the consequences of environment and social culture that occur in Lake Tempe.

This research used a qualitative approach. Informants were determined using the Snowball method. Data were collected by using technique of indept interview, participant observation, and documentation.

The results showed that *pa'jabba* got access to fishing areas, ownership of fishing gear, capital, market access, and government assistance through mechanisms in the form of cooperation with fishing area owners, relationships with authorities, relationships with investors, relationships with market players, social identity, and join a fishing group. Whereas *pa'bungka* access includes access to control of fishing areas, capitalist, market access, labor, and land assets that are sought through a large accumulation of profits, government permits, character identity, and relationships with various parties such as authorities to patronage relationships with other fishermen. Fishermen's access is influenced by regulations, values and beliefs, social networks, and moral discourse. The environment consequence of fishery resources utilization form a decrease in fish populations and silting of the lake. Meanwhile, the socio-cultural consequence are such as social inequality, change in social institusions, waning local wisdom values, and mindset of local community.

Keywords: *pa'jabba, pa'bungka, access, consequence, fishery resources.*



DAFTAR ISI

SAMPUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Tinjauan Konseptual	12
1. Sumber Daya Perikanan	12
a. Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan.....	14
b. Pengelolaan Sumber Daya Perikanan	23
2. Karakteristik Nelayan (<i>Pa'jabba</i> dan <i>Pa'bungka</i>)	29
3. Danau dan Pengembangan Perikanan Darat	32
4. Teori Akses dalam Ekologi Politik.....	34
a. Teori akses	36
b. Model berbasis aktor	39
B. Alur Pemikiran	44
BAB III METODE PENELITIAN	46
A. Jenis Penelitian	46
B. Waktu dan Lokasi Penelitian	47
C. Informan Penelitian	47
D. Teknik Pengumpulan Data.....	49
1. Observasi	49
2. Wawancara	51
3. Dokumentasi	54

E. Analisis Data	55
F. Etika Penelitian	56
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	57
A. Kondisi Geografis Danau Tempe	57
B. Karakteristik Masyarakat Danau Tempe	59
C. Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan Danau Tempe	61
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	68
A. Akses <i>Pa'jabba</i>	69
1. Bentuk akses <i>Pa'jabba</i>	70
2. Mekanisme akses <i>Pa'jabba</i>	83
3. Faktor yang Mempengaruhi akses <i>Pa'jabba</i>	96
B. Akses <i>Pa'bungka</i>	109
1. Bentuk Akses <i>Pa'bungka</i>	110
2. Mekanisme Akses <i>Pa'bungka</i>	117
3. Faktor yang Mempengaruhi Akses <i>Pa'bungka</i>	128
C. Konsekuensi Lingkungan dan Sosial Budaya	136
1. Konsekuensi lingkungan	137
2. Konsekuensi sosial budaya	142
BAB VI KESIMPULAN	152
DAFTAR PUSTAKA	157
LAMPIRAN	165

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Tabel 1.....	86
Gambar 4.1	58
Gambar 4.2	64
Gambar 4.3	65
Gambar 4.4	66
Gambar 4.5	67
Gambar 5.1	75
Gambar 5.2	76
Gambar 5.3	77
Gambar 5.4	98
Gambar 5.5	101
Gambar 5.6	112
Gambar 5.7	124
Gambar 5.8	129
Gambar 5.9	135

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Danau adalah bentuk ekosistem perairan pada suatu cekungan di permukaan bumi yang luasnya relatif kecil jika dibandingkan dengan laut dan daratan. Meskipun demikian, danau menyimpan potensi sumber daya perairan yang cukup besar untuk memenuhi kehidupan manusia. Masyarakat sekitar danau memanfaatkan potensi sumber daya alam danau dengan berbagai aktivitas ekonomi yang dicocokkan dengan cara hidup dan bermukim manusia. Pemanfaatan tersebut terdiri dari beberapa pengguna baik dari sektor pertanian hingga perikanan yang memiliki kepentingan yang berbeda dalam pemanfaatannya. Sebagaimana disampaikan oleh Adrianto dkk (2009) bahwa keberadaan danau memberi manfaat bagi kehidupan sekitarnya, seperti penyedia air bersih, potensi sumber daya perikanan, irigasi pertanian, ekosistem bagi habitat tumbuhan dan satwa, pengendali banjir, jasa transportasi, pariwisata, hingga sarana penelitian dan pendidikan. Oleh karena itu potensi ekonomi perairan danau sangat menguntungkan untuk dimanfaatkan.

Sulawesi Selatan menyimpan potensi sumber daya perairan danau yang sangat besar, diantaranya Danau Tempe, Danau Matano, dan Danau Towuti. Khusus Danau Tempe, secara administratif berada pada 3 kabupaten yaitu Kabupaten Wajo menguasai 54.6% perairannya, Kabupaten Sidenreng Rappang seluas 34.6%, dan Kabupaten Soppeng sekitar 10.7%. Luas Danau Tempe pada saat puncak musim hujan mencapai 47.800 Ha dan pada musim kering luasannya hanya 3.000 Ha.

Potensi ekonomi di kawasan Danau Tempe sebagian besar dimanfaatkan untuk kegiatan perikanan dan pertanian (Badan Pusat Statistik, 2011).

Sumber daya perikanan di Danau Tempe dimanfaatkan masyarakat sekitar yang mayoritas sebagai nelayan. Menurut Hamka (2019) masyarakat nelayan di Danau Tempe telah beradaptasi mengikuti pola perubahan musim yang terjadi. Untuk mengantisipasi banjir luapan air danau pada saat musim hujan mereka memodifikasi rumah dengan membangun panggung di dalam rumah dari bahan bambu, meletakkan perabot rumah tangga di loteng (*rakkeang*) serta memasang penyangga rumah. Pada Musim kemarau beberapa nelayan kecil berpindah profesi sementara menjadi petani ataupun kuli tani yang bercocok-tanam di pesisir Danau Tempe. Sebagian dari mereka juga berangkat ke kota untuk menjadi tukang bangunan. Perempuan, istri nelayan juga ikut turut mengambil peranan dengan membuat pukot dan jala, membuat abon ikan, dan lain sebagainya guna memenuhi kebutuhan hidupnya.

Kegiatan perikanan di danau Tempe masih didominasi oleh kegiatan penangkapan ikan secara langsung daripada pembudidayaan. Metode penangkapan ikan di Danau Tempe juga sangat beragam dengan diperkenalkannya jenis alat tangkap terbaru seperti pukot, *lifnet* (*tongkang*) dan perangkap dasar (*jabba*) yang menggantikan alat tangkap tradisional seperti jaring insang (*lanra*) dan bubu (*buu*). Di sisi lain beberapa kelompok nelayan masih mempertahankan cara tradisional dalam menangkap ikan menggunakan tanaman air seperti eceng gondok dan kangkung untuk menciptakan tempat perlindungan bagi ikan (*shelter*) yang disebut sebagai *bungka toddo*. Prinsip kerja *bungka toddo*

mirip seperti rumpon (*Fishing Aggregating Device*) yang ada di laut, fungsinya untuk menarik sekumpulan ikan berlingung di sekitarnya sehingga ikan lebih mudah ditangkap. Hanya saja jika rumpon menggunakan ranting, dahan, hingga ban sebagai rumah ikan maka *bungka toddo* menggunakan tanaman air. Karena berada di perairan danau yang tidak cukup dalam, maka *bungka toddo* tidak memerlukan pemberat seperti rumpon. *Bungka toddo* hanya menggunakan patok bambu untuk menahan tanaman air seperti eceng gondok agar tidak terbawa arus. Nelayan yang menggunakan cara ini dikenal sebagai *pa'bungka* (Krisbandono dkk, 2015).

Saat ini umumnya kegiatan perikanan tangkap didominasi oleh penggunaan perangkap ikan (*fish trap*) berjenis perangkap dasar (*fyke net*) yang masyarakat sekitar sebut sebagai *jabba*. Pemasangan perangkap ikan jenis ini dapat dilakukan nelayan pada saat kondisi air danau sedang naik hingga surut. Dikarenakan lokasi pemasangannya ditempat yang dangkal maka pada saat air danau sedang naik perangkap ikan dipasang di tepi daratan sedangkan pada saat air danau sedang surut maka perangkap ikan dipasang agak ke tengah danau. Nelayan yang menggunakan perangkap jenis ini disebut sebagai *pa'jabba* (Ramadhan dkk, 2007).

Muliawan dan Priyatna (2008) menjelaskan bahwa ada ketimpangan keuntungan yang sangat besar antar nelayan besar dan nelayan kecil di Danau Tempe, keuntungan besar hanya didapatkan oleh nelayan bermodal besar dengan alat tangkap *bungka toddo*, hal ini berbeda jauh dengan hasil tangkapan yang diperoleh nelayan kecil dengan penggunaan

alat tangkap tradisional seperti jaring atau bubu. Masuknya alat tangkap modern dengan modifikasi tertentu memberikan hasil tangkapan yang cukup besar, salah satunya adalah perangkap dasar (*jabba*). Hal ini memaksa nelayan meninggalkan penggunaan peralatan tradisional seperti jaring insang (*lanra*) dan bubu beralih ke penggunaan perangkap ikan (*fish trap*) yang memberikan hasil tangkapan yang menjanjikan. Di tengah maraknya penggunaan berbagai jenis alat tangkap yang tidak terkendali, maka apa yang para ahli sebut sebagai *overfishing* akhirnya terjadi dan mengancam populasi ikan di perairan danau. Menurut Roza dkk (2013) bahwa *overfishing* merupakan bentuk eksploitasi sumber daya perikanan secara berlebihan yang ditandai dengan hasil ikan tangkapan yang belum dewasa dan berukuran kecil.

Untuk membatasi tindakan eksploitasi Danau Tempe maka pemerintah daerah mengeluarkan aturan mengenai pengelolaan sumber daya perikanan. Salah satu aturan tersebut berupaya membatasi penggunaan alat tangkap tertentu di Danau Tempe melalui Perda Kab. Wajo No. 4 Tahun 2012 pasal 35. Dalam aturan tersebut, *jabba* sebagai salah satu alat tangkap yang dilarang di kawasan perairan danau Tempe. Hal ini berarti semua kegiatan yang dilakukan *pa'jabba* dikategorikan ilegal. Sementara untuk *bungka toddo* hanya diatur mengenai ukuran dan jarak diantara unitnya. *Pa'bungka* juga dibatasi dalam hal jumlah kepemilikan *bungka toddo'* yaitu maksimal 4 unit (Perda Kab Wajo No 4, 2012).

Saat ini jumlah unit *bungka toddo* yang terpasang tidak terkendali dan mengurangi luasan kawasan tangkap nelayan. Apalagi tidak semua

kawasan di Danau Tempe merupakan kawasan milik bersama (*common property*), namun terdapat beberapa kawasan perairan danau merupakan milik pemerintah (*state property*) dan milik pribadi (*private property*). Kawasan perairan danau milik pemerintah disebut sebagai *ex ornament* sedangkan kawasan milik privat disebut sebagai *ongko*. Hak pengelolaan kawasan *ex ornament* diberikan kepada masyarakat yang mampu menyewa selama 2 tahun dan didapatkan melalui sistem lelang. Sedangkan *ongko* sejak lama merupakan aset/ property yang dikuasai oleh keluarga *arajang* (semacam bangsawan lokal) yang diwariskan turun temurun. *Ongko* mirip seperti kepemilikan tanah yang juga dapat beralih kepemilikan melalui jual beli. Karena itulah kedua kawasan tersebut membuat siapapun selain pemilik dan pengelola tidak boleh mengambil manfaat sumber daya di dalamnya (Saad, 1998).

Sebenarnya kawasan *ex ornament* berlaku bebas tangkap pada saat kondisi permukaan danau sedang naik. Namun ketika permukaan danau mulai surut (sekitar 1,5 meter) maka barulah penguasaan atas kawasan tersebut berlaku. Pada saat itu krey bambu (semacam pagar) yang terpasang mengelilingi *ex ornament* mulai terlihat, pada saat itu pula nelayan pengelola mulai mengambil ikan di tempat itu, cara ini disebut sebagai *pallawang*. Selain itu ada juga beberapa nelayan yang menggunakan *bungka toddo* di kawasan *ex ornament*. Umumnya nelayan (*pa'bungka*) juga harus memenangkan lelang terlebih dahulu sebelum mengelola *ex ornament* dan penguasaan baru berlaku ketika danau mulai surut, namun karena *bungka toddo* sulit dilalui oleh perahu motor dan tidak mungkin memasang alat tangkap di sekitarnya tanpa merusak

bungka toddo maka kawasan tersebut tetap tidak terjamah. Inilah yang dimanfaatkan oleh pemiliknya (*pa'bungka*) untuk memperluas kawasannya dan terkadang melanggar aturan luasan satu unit *bungka toddo* begitupun aturan mengenai jarak antar unit. Hal ini menyebabkan kurangnya luasan kawasan bebas tangkap nelayan lainnya. Masalah tersebut baru ditanggapi pemerintah ketika nelayan secara beramai-ramai mendatangi badan pemerintah tertentu dalam bentuk aksi massa (AIFDR, 2015: 34-35).

Praktik-praktik yang bersifat tidak berkelanjutan dalam pemanfaatan sumber daya perikanan di Danau Tempe sampai saat ini masih terjadi. Berbagai cara dilakukan nelayan untuk mempertahankan akses terhadap sumber daya alam. Eksklusi atau penutupan akses terjadi pada kawasan-kawasan seperti *ex ornament* yang dikuasai hanya oleh nelayan dengan modal besar. Sebaliknya nelayan kecil harus beralih pada pilihan alternatif lain seperti menjaga hubungan patron-klien antara punggawa dan sawi yang bersifat mengikat. Tingkat kemandirian para nelayan sawi tergantung pada tersedianya pekerjaan dan hasil tangkapan ikan (Priyatna, 2011).

Hasil penelitian Said (2019) menunjukkan bagaimana jaringan sosial yang berlangsung diantara aktor yang memanfaatkan sumber daya perikanan di Danau Tempe tidak seimbang antar nelayan besar dan nelayan kecil. Perbedaan yang besar dalam mengontrol akses jaringan sosial berbanding lurus dengan ketimpangan hasil sumber daya perikanan di Danau Tempe. Sebagai contoh kasus, nelayan dengan modal besar (*pallawang*) yang mendominasi jaringan sosial daripada nelayan pada

umumnya akhirnya mendapatkan keuntungan ekonomi yang lebih besar pula dibandingkan nelayan kecil. Nelayan kecil hanya fokus pada kegiatan subsisten dan cenderung termarginalkan sehingga melakukan tindakan resistensi.

Di tengah ketimpangan persaingan antar nelayan, Danau Tempe juga terancam mengalami pendangkalan dan kerusakan ekosistem. Pada tahun 2015 pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR telah melakukan kebijakan dan langkah-langkah yang mereka sebut sebagai Program Revitalisasi Danau Tempe, dengan mengoprasikan bendung gerak. Hal ini sebagai langkah pertama pemerintah untuk mempertahankan sumber air Danau Tempe bagi perusahaan PDAM. Langkah selanjutnya adalah pemerintah melakukan pengerukan sedimen danau untuk menambah volume tampungan air dan membangun beberapa pulau buatan di sekitar danau (Kementerian PUPR, 2015). Menurut Suriadi dkk (2015) bahwa pulau buatan tersebut merupakan bagian dari skema resolusi konflik yang kemungkinan akan terjadi akibat revitalisasi danau.

Kebijakan pemerintah dalam membangun bendung gerak di wilayah hilir Danau Tempe telah menyebabkan perubahan muka air danau yang justru tidak surut pada musim kemarau. Hal ini langsung direspon nelayan yang menggunakan *bungka toddo* yang selama ini mengandalkan keringnya danau untuk mendapatkan ikan. Salah satunya aksi massa pada tahun 2018 yang dilakukan nelayan *bungka toddo* di kantor DPRD menuntut pembukaan bendung gerak pada musim kemarau (AFDR, 2015).

Dari serangkaian penelitian tersebut menunjukkan bahwa di Danau Tempe terdapat banyak permasalahan yang kompleks dan menarik untuk dikaji. Namun masih kurang kajian yang berkaitan dengan persoalan akses sumber daya danau serta permasalahan lingkungannya. Penelitian sebelumnya belum menyentuh aspek ekologi politik, terutama persoalan perubahan lingkungan dan persaingan sumber daya perikanan yang diakibatkan faktor-faktor ekonomi dan politik yang lebih luas. Lebih khusus lagi, dengan semakin intensifnya pemanfaatan sumber daya perikanan danau dari tahun ke tahun yang memberi perubahan besar bagi berbagai aspek persoalan di Danau Tempe akan memberikan kebaruan bagi penelitian ini ke depannya.

Kondisi cuaca yang tidak menentu ditambah keinginan pemerintah untuk mempertahankan debit air danau untuk irigasi pertanian maupun kebutuhan air baku membuat kondisi permukaan air tidak menurun yang menyebabkan ikan-ikan di *bungka toddo* sulit dipanen. Nelayan *bungka toddo* yang disebut *pa'bungka* dilanda kecemasan akan resiko kerugian, akibatnya mereka memaksakan panen pada akhir bulan musim kering sebelum memasuki musim hujan meskipun kondisi danau belum surut yang akhirnya membuat hasil panen tidak maksimal. Maka cara untuk menutupi resiko dan memaksimalkan hasil tangkapan dengan memperluas kawasan *bungka toddo* sesuai kemampuan modal yang dimiliki. Hal ini justru menjadikan luas areal penangkapan ikan bagi nelayan dengan alat tangkap lainnya seperti *pa'jabba* semakin berkurang. Kondisi Danau Tempe yang telah mengalami perubahan dan kurangnya areal tangkapan yang strategis mempengaruhi akses nelayan terhadap

sumber daya perikanan dan berbagai kepentingan aktor yang bersaing di dalamnya. Penelitian ini akan memfokuskan kajian akses aktor nelayan yang selama ini mendapatkan keuntungan dari sumber daya danau yaitu *pa'bungka* dan *pa'jabba*. Seperti yang dikatakan Hardin (1968) bahwa konstestasi berbagai kepentingan aktor terhadap sumber daya alam pada akhirnya berdampak pada penurunan kualitas sumber daya alam hingga degradasi lingkungan.

Menurut Bryant dan Bailey (1997), perubahan yang terjadi pada lingkungan tidaklah bersifat netral, tetapi suatu bentuk politisasi lingkungan yang melibatkan banyak aktor-aktor di tingkat lokal, regional, hingga global. Hal yang sama terjadi di Danau Tempe, dimana aktor negara, pasar, hingga masyarakat saling berhubungan dalam proses untuk mendapatkan, mempertahankan hingga mengendalikan akses sumberdaya perikanan. Siapa yang paling diuntungkan dan siapa yang disingkirkan? Faktor apa sajakah yang menentukan akses aktor dalam memanfaatkan sumberdaya? Apakah proses sosial politik dalam pemanfaatan sumber daya perikanan danau memiliki konsekuensi terhadap lingkungan atau kondisi sosial budaya masyarakat sekitarnya?

B. Rumusan Masalah

Seperti yang telah disinggung sebelumnya, akses nelayan dalam memanfaatkan sumber daya perikanan di Danau Tempe telah berlangsung lama. Berbagai kebijakan dan regulasi pemerintah dengan berbagai kepentingan dan kekuasaan dibaliknya, mempengaruhi akses nelayan. Aktor-aktor nelayan akan merespon dan menggunakan beragam cara untuk mendapatkan, mempertahankan, hingga mengendalikan akses

terhadap sumber daya danau. Penelitian ini tidak hanya berfokus pada dinamika akses sumber daya perikanan di Danau Tempe melainkan pada bagaimana proses-proses tersebut berdampak pada lingkungan dan sosial budaya masyarakat sekitar.

Berdasarkan hal tersebut masalah pokok penelitian dapat dirinci dalam beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses akses *pa'jabba* dalam pemanfaatan sumber daya perikanan di Danau Tempe?
2. Bagaimana proses akses *pa'bungka* dalam pemanfaatan sumber daya perikanan di Danau Tempe?
3. Bagaimana konsekuensi pemanfaatan sumberdaya perikanan terhadap lingkungan dan sosial budaya masyarakat di Danau Tempe?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian diharapkan:

1. Menjabarkan proses akses *pa'jabba* dalam pemanfaatan sumber daya perikanan di Danau Tempe?
2. Menjabarkan proses akses *pa'bungka* dalam pemanfaatan sumber daya perikanan di Danau Tempe
3. Menjelaskan konsekuensi dari pemanfaatan sumberdaya perikanan terhadap lingkungan dan sosial budaya masyarakat di Danau Tempe?

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini selain sebagai sumber informasi mengenai keadaan dan kondisi sumber daya perairan Danau Tempe, juga

secara akademik dalam pengembangan teori-teori sosial khususnya antropologi dalam menjelaskan hubungan masyarakat dan lingkungannya berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam.

Kemudian manfaat praktis dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan pemerintah pusat maupun daerah dalam menangani dan berusaha memecahkan persoalan yang terjadi di Danau Tempe saat ini. Pengambilan kebijakan yang tepat dapat berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang selama ini bergantung pada sumber daya alam Danau Tempe.

Untuk peneliti sendiri adalah sebagai bahan dalam meningkatkan pengetahuan dan pengalaman dalam meneliti berbagai persoalan yang berkaitan dengan ilmu Antropologi serta ujian dalam meningkatkan kompetensi selama belajar di Departemen Antropologi Universitas Hasanuddin sehingga layak menyandang gelar Magister.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian ini peneliti berupaya menjabarkan konsep-konsep dalam penelitian yang berhubungan dengan fokus penelitian yang dilaksanakan. Adapun hal-hal yang dikemukakan diantaranya tinjauan konseptual dan alur berpikir

A. Tinjauan Konseptual

Pada sub bagian tinjauan konseptual ini dipaparkan dan dijelaskan secara detail tentang konsep-konsep penelitian diantaranya Sumber Daya Perikanan, Karakteristik Nelayan (*Pa'jabba* dan *Pa'bungka*), Danau dan Pengembangan Perikanan Darat, serta Teori Akses dalam Pendekatan Ekologi Politik. Penjelasan mengenai konsep-konsep tersebut dirinci sebagai berikut.

1. Sumber Daya Perikanan

Keberadaan ekosistem danau memberikan sumber daya alam yang cukup beragam bagi manusia seperti sumber air baik untuk kebutuhan rumah tangga dan irigasi pertanian, penghasil energi listrik melalui PLTA, hingga sumber daya perikanan yang bernilai ekonomi tinggi (Uswa, 2007). Danau memberikan potensi sumber daya alam yang cukup menjanjikan, terdiri dari potensi perikanan, potensi sumber daya air, potensi pertanian, pariwisata, dan transportasi. Potensi perikanan danau telah memberi kontribusi ekonomi yang tinggi terhadap masyarakat di sekitarnya, dengan beragam spesies ikan air tawar seperti ikan mas, mujair, ikan sepat, ikan lele, nila, dan sebagainya. Di sisi lain potensi pertanian di sekitar danau juga menjanjikan diantaranya

tanaman pangan (padi dan jagung), pertanian pada saat danau surut (palawija, kacang-kacangan, semangka), dan perkebunan (murbei). Sementara di sektor lain yang dapat menambah nilai ekonomi masyarakat adalah sektor jasa transportasi air (Ramadhan dkk, 2007).

Umumnya sumber daya perikanan didefinisikan sebagai sumber daya yang ada di laut. Namun menurut Bachtiar (2004) bahwa sumber daya perikanan meliputi segala sumber daya alam perairan yang memiliki potensi mendukung perekonomian. Sumber daya perikanan tidak hanya ikan-ikan yang ada di perairan tetapi juga meliputi sumber daya lingkungan serta sumber daya buatan yang digunakan untuk memanfaatkan sumber daya ikan. Untuk itu diperlukan pengelolaan sumber daya perikanan yang mencakup tidak hanya eksploitasi terhadap ikan tetapi juga mengenai pengelolaan lingkungan dan manajemen teknologi yang dimanfaatkan manusia dalam memperoleh manfaat dari sumber daya perikanan.

Menurut Mahreda dan Dekayanti (2012) bahwa pemanfaatan sumber daya perikanan khususnya kawasan danau belum optimal dimana sebagian besar pemanfaatannya tidak selektif dan mengambil langsung dari alam. Selain itu masyarakat kurang memanfaatkan potensi budidaya perikanan, pengolahan produk perikanan, hingga pemasaran. Praktik pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya perikanan juga cenderung eksploitatif dan tidak menunjang kelestarian lingkungan.

a. Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan

Nelayan sebagai masyarakat yang memanfaatkan dan mengelola sumber daya perikanan baik di laut maupun danau memiliki pola kebudayaan yang khas. Kebudayaan menjadi kerangka berpikir pedoman bagi nelayan dalam bertindak dan berinteraksi dengan lingkungan kesehariannya. Berbagai upaya dalam memanfaatkan sumberdaya perikanan mulai dari penguasaan teknologi, metode penangkapan, hingga peningkatan modal untuk meningkatkan kapasitas dan hasil tangkap (Kusnadi, 2005:4).

Pola aktivitas nelayan biasanya mengikuti pola musim dan kondisi lingkungan perairan. Pola pemanfaatan sumberdaya perikanan di danau mengikuti kondisi permukaan air yang pasang dan surut akibat perubahan musim. Masyarakat nelayan danau telah beradaptasi mengikuti pola musim dengan memanfaatkan danau yang kering untuk kegiatan pertanian (Hamka, 2019).

Sebagai sumber daya alam, sumber daya perikanan dapat dilihat dari sifat sumber dayanya, lingkungan yang berarti kawasan penangkapannya, serta sumber daya buatan dalam hal teknologi yang digunakan manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam tersebut. Berikut disajikan secara rinci sifat sumber daya perikanan, pembagian kawasan penangkapan, serta alat tangkap yang digunakan.

1) Sifat sumber daya perikanan

Sumber daya alam sangat berkontribusi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang seperti Indonesia. Namun peningkatan ekonomi justru dapat membuat sumber daya alam

semakin menipis. Untuk itu pemanfaatan sumber daya alam yang bijaksana harus diperhatikan dengan melihat sisi positif dan negatifnya.

Ikan merupakan jenis sumber daya alam yang dapat diperbaharui atau bersifat *renewable* yaitu sifat yang dapat pulih dan memperbaharui diri. Sifat ini berarti stock sumber daya tersebut dapat bertambah dalam waktu yang relatif cepat. Selain itu, menurut Widodo dan Nurhakim (2002), sumber daya ikan juga memiliki sifat *open access* dan sifat *common property*. *Open access* berarti terbuka bagi siapa saja untuk masuk dan memanfaatkan sumber daya tersebut, dalam hal ini ikan menjadi hak bagi semua orang untuk memanfaatkannya. Sedangkan *common property* berarti sumber daya tersebut tidak dimiliki oleh siapa pun karena merupakan milik bersama dan perlu dikelola melalui regulasi atau kebijakan pemerintah.

Sumber daya perikanan yang bersifat terbarukan dan terbuka bagi siapa saja untuk mengaksesnya maka terdapat konsekuensi yang ditimbulkan. Tanpa adanya pengelolaan yang tepat dapat menimbulkan gejala eksploitasi yang berlebihan (*over fishing*). Selain itu, perlunya hak kepemilikan dalam pengelolaannya seperti dimiliki oleh negara (*state property right*), milik sekelompok masyarakat (*community property right*), atau milik perorangan (*private property right*). Sehingga meskipun bersifat terbuka bagi semua orang terdapat hukum-hukum negara yang membatasi perilaku eksploitasi mereka.

Persepsi tentang kepemilikan bersama atas sumber daya perikanan justru dapat menimbulkan praktik pengambilan sumber daya perikanan secara besar-besaran yang menyebabkan penurunan nilai

dan produks sumber daya tersebut. Hal ini karena dampak lingkungan yang ditimbulkan memerlukan waktu yang cukup lama untuk memulihkannya. Menurut Nikijuluw (2002) bahwa upaya pengendalian dan pengawasan sumber daya perikanan cukup sulit karena sifatnya yang bergerak pada kawasan perairan yang luas. Karena itu orang sangat mudah untuk masuk ke dalamnya sementara pihak otoritas sulit memaksa mereka untuk keluar. Kegiatan pemanfaatan sumber daya perikanan akan selalu mempengaruhi orang lain yang juga memanfaatkannya. Untuk itu dalam hal sumber daya perikanan selalu ada persaingan yang dapat memicu konflik. Sementara di sisi lain sumber daya perikanan ini sangat sulit untuk dibagi atau dipisahkan, meskipun pembagian secara ruang administratif dapat dilakukan oleh otoritas pemerintah.

2) Kawasan penangkapan (*fishing ground*)

Kawasan penangkapan (*fishing ground*) adalah suatu daerah perairan dimana ikan yang menjadi sasaran penangkapan tertangkap dalam jumlah yang maksimal dan alat tangkap dapat dioperasikan serta ekonomi. Daerah tersebut harus memiliki kondisi dimana ikan dengan mudahnya datang bersama-sama dalam kelompoknya, dan tempat yang baik untuk dijadikan habitat ikan tersebut. Kondisi yang diperlukan sebagai daerah penangkapan ikan harus dimungkinkan dengan lingkungan yang sesuai untuk kehidupan dan habitat ikan, dan juga melimpahnya makanan untuk ikan. Tetapi ikan dapat dengan bebas memilih tempat tinggal dengan kehendak mereka sendiri menurut keadaan dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat. Oleh karena

itu, jika mereka tinggal untuk waktu yang agak lebih panjang pada suatu tempat tertentu, tempat tersebut kemudian menjadi daerah penangkapan ikan. Menurut Mukhtar (2010) bahwa Kondisi-kondisi yang perlu dijadikan acuan dalam menentukan daerah penangkapan ikan di antaranya habitat yang baik untuk ikan, mudah mengoperasikan alat tangkap, dan lokasi yang bernilai ekonomis.

Umumnya perairan pantai yang bisa menjadi daerah penangkapan ikan memiliki kaitan dengan kelimpahan makanan untuk ikan. Tetapi terkadang pada perairan tersebut susah untuk dilakukan pengoperasian alat tangkap, khususnya peralatan jaring karena keberadaan kerumunan bebatuan dan karang koral walaupun itu sangat berpotensi menjadi pelabuhan. Terkadang tempat tersebut memiliki arus yang menghanyutkan dan perbedaan pasang surut yang besar. Pada tempat tersebut para nelayan sedemikian perlu memperhatikan untuk menghiraukan mengoperasikan alat tangkap. Terkadang mereka menggunakan *fish trap*, *gill nets* dan peralatan memancing ikan sebagai ganti peralatan jaring seperti *trawl* dan *purse seine*. Sebaliknya, daerah penangkapan lepas pantai tidak mempunyai kondisi seperti itu, tapi keadaan menyedihkan datang dari cuaca yang buruk dan ombak yang tinggi. Para nelayan juga harus mengatasi kondisi buruk ini dengan efektif menggunakan peralatan menangkap ikan.

Daerah tersebut harus bertempat di lokasi yang bernilai ekonomis. Ini sangat alamiah di mana manajemen akan berdiri atau jatuh pada keseimbangan antara jumlah investasi dan pemasukan. Anggaran dasar yang mencakup pada investasi sebagian besar dibagi menjadi dua

komponen, yakni modal tetap seperti peralatan penangkapan ikan dan kapal perikanan, dan modal tidak tetap seperti gaji pegawai, konsumsi bahan bakar dan biaya perbekalan. Para manajer perikanan harus membuat keuntungan pada setiap operasi. Jika daerah penangkapan tersebut terlalu jauh dari pelabuhan, itu akan memerlukan bahan bakar yang banyak. Jika usaha perikanan tersebut benar-benar memiliki harapan yang besar, usaha yang dijalankan mungkin boleh pergi ke tempat yang lebih jauh. Nelayan yang dalam kasus demikian dapat memperoleh keuntungan dengan manajemen usaha perikanan. Jika kita dapat membuat alat untuk meningkatkan efisiensi usaha perikanan seperti menggunakan mesin perikanan yang lebih efisien, kemudian kita dapat juga memperbesar kapasitas kita untuk menangkap ikan ke tempat yang lebih jauh. Daerah penangkapan ikan juga dikontrol oleh permintaan pasar untuk ikan. Permintaan untuk produk ikan dipengaruhi oleh kapasitas ketersediaan dari tempat tersebut, sebagai contoh, adalah baru saja dikembangkan sebagai daerah penangkapan ikan. Jadi, daerah penangkapan ikan selalu memiliki nilai yang relatif, berhubungan dengan keseimbangan ekonomi, daerah penangkapan ikan lainnya, efisiensi usaha perikanan dan permintaan ikan di dalam pasar. Begitulah, harus selalu berusaha menemukan daerah penangkapan ikan yang ekonomis dan efektif dari metode penangkapan ikan yang dimodernisasi.

Kusbandono dkk (2015) mengatakan dalam perkembangan pola pemanfaatan sumber daya perikanan di Danau Tempe, terdapat

beberapa penggolongan wilayah penangkapan. Jenis-jenis tempat penangkapan ikan di Danau Tempe meliputi:

- *Bungka Toddo*: Suatu areal dengan luasan tertentu di perairan danau yang dibatasi patok-patok bambu (*belle*) dengan berbagai tanaman air maupun rerumputan di dalamnya. Prinsipnya untuk memancing dan menarik ikan berlandung ke dalamnya. Pengambilan ikan dilakukan pada awal musim kemarau saat air danau mulai surut. Satu unit *bungka toddo* menurut aturan biasanya berukuran 125 m x 125 m dengan keliling sekitar 500 m.
- *Pallawang*: Tempat tertentu pada pinggir danau yang batasnya telah ditentukan untuk dikuasai dengan dipasang krey atau *belle* (alat yang terbuat dari anyaman bambu) di sekelilingnya dan dipasang jaring. Batas-batas *pallawang* ditandai secara jelas dan mulai efektif berlaku ketika air sudah mulai surut sehingga terlihat batas *belle* yang memiliki ketinggian 1,5 cm dari dasar danau. Saat masih merendam *belle*, nelayan lain dapat melintas dan menangkap ikan dengan bebas.
- *Salo-salo*: Wilayah pengairan yang terdapat didalam daerah danau atau yang terdapat di pinggirnya dimana airnya mengalir dari atau ke danau itu, yang di pasangi dengan alat-alat penangkap ikan (jermal).
- *Kalobeng*: Berupa lubang yang digali di sekitar pinggiran danau dan rawa menyerupai kolam, biasa juga disebut *koco*.
- *Balete*: Tempat-tempat yang dibuat untuk sebagai pembantu untuk menangkap ikan di pinggir-pinggir Danau yang berbentuk seperti sawah-sawah yang diberi tanggul.
- Rawa-rawa: Biasanya disebut *tappareng-salae* atau danau kecil yaitu kawasan perairan di luar danau yang merupakan tempat-tempat penangkapan ikan secara bebas, yang dihubungkan dengan sungai-sungai. Pada musim hujan airnya meluap hingga menyatu dengan danau besar dan pada musim kemarau kondisinya kering.

3) Alat tangkap (*fishing gear*)

Pengelompokan klasifikasi alat dan metode penangkapan ikan oleh para ahli bisa berbeda satu dengan yang lain karena sudut pandang yang berbeda. Ada yang melihat bagaimana proses tertangkapnya ikan, misalnya ada ikan yang tertangkap karena terjerat pada jaring. Ada pula karena terkurung pada jaring sehingga ikan tersebut tertangkap. Ada pula ikan tertangkap karena terperangkap pada suatu alat tangkap, seperti bubu, sero, atau *set net*. Dalam penangkapan ikan, beberapa jenis alat penangkapan menggunakan alat bantu dengan memanfaatkan tingkah laku ikan. Misalnya, dalam penggunaan jaring angkat, seperti bagan, para nelayan menggunakan cahaya untuk menarik perhatian ikan. Setelah ikan berkumpul di atas jaring, lalu jaring diangkat dan tertangkaplah ikan-ikan tersebut. Di samping alat tangkap, kemampuan dan keterampilan teknis dari nelayan yang akan melakukan penangkapan ikan merupakan bagian penting dalam proses penangkapan (Sudirman, 2013).

Dalam klasifikasi metode penangkapan ikan, terdapat klasifikasi yang sifatnya sederhana atau terperinci. Adapun jenis alat tangkap yang digunakan di Danau Tempe menurut Koensedrajana dkk (2007) antara lain:

- *Jabba (fish trap)*: Alat tangkap ini berbentuk persegi panjang seperti kandang yang di bagian tengah salah satu sisinya diberi celah sempit secara vertikal sebagai jalur masuknya ikan. Prinsipnya diletakkan di dasar perairan kemudian diberi tiang (*patto'*) sebagai penanda dan agar tidak hanyut. Ada dua jenis *jabba* yang sering digunakan yaitu *jabba* dengan kawat besi yang

bisa dibuat sendiri oleh nelayan dari gulungan kawat besi dan *jabba* dengan jaring atau *trawl* yang lebih besar berbentuk terowongan bersambung terbuat dari nilon dengan kerangka kawat besi dimana ujungnya terdapat ikatan simpul.

- *Cappiang*: Alat perangkap ikan yang terdiri dari *belle/ krey* dengan bubu, dan di pasang pada tempat-tempat dan waktu yang tertentu, dimana ujung-ujungnya berpegang pada tempat-tempat yang tertentu.
- *Tongkang (liftnet)*: Alat tangkap ikan dengan menggunakan jaring dengan gagang seperti gayung. Umumnya memerlukan areal genangan yang cukup tinggi.
- *Lanra (gillnet)*: *Lanra'* adalah jaring insang (*gill net*). Terbuat dari nilon, ukuran lebarnya beragam 3,5, 9, 10 dan 11 cm; panjangnya biasanya 20 m. Untuk membuat *lanra'* biasanya bahan-bahan yang digunakan adalah: timah (pemberat), tali nilon ukuran 1,2 - 3 inci; dan nilon warna putih dalam ukuran 0,5 inci. *Lanra* dibuat berupa jaring dengan ukuran mata jaring empat hingga lima sentimeter. Bagian atas *lanra* diikatkan pada tali yang diberi pelampung dari bahan bekas botol minuman, bagian bawahnya diberi pemberat.
- *Julu* atau *bunre (seine net)*: *Julu* adalah kantong-kantong jaring yang dipasang melebar berlawanan dengan arus sungai. Alat ini biasanya dibuat sendiri oleh nelayan dan biasanya dipasang di sungai-sungai besar.
- *Jala*: *Jala* atau jaring lempar (*cash net*) adalah jaring berbentuk lingkaran kecil dengan pemberat pada tepi-tepinya yang ditebar oleh nelayan. Ukurannya bervariasi sampai 4 meter pada diameternya. Penggunaanya dengan cara menebarkan atau mencampakkan ke air.
- *Bubu (buu)*: Alat tangkap tradisional terbuat dari bambu berbentuk silinder yang diberi celah sempit di ujungnya. Biasanya satu unit bubu berukuran panjang 10 cm. Alat ini diletakkan di dasar perairan kemudian ditinggalkan beberapa lama, ikan akan terperangkap bila memasuki bubu.

- *Bessi Bale* (Tombak): *Bessi bale* digunakan untuk menombak ikan yang terbuat dari kayu atau bambu panjang. Mata tombak terbuat dari besi dengan ujung runcing. Dibuat sendiri oleh nelayan untuk menangkap ikan-ikan berukuran besar.
- *Strom aki*: Menggunakan alat setrum yang berupa aki kecil sekitar 12 volt, kondensator, saklar, lempeng platina, yang dipasang pada 2 bilah kayu/bambu untuk menyetrum ikan dengan aliran listrik.

Pemanfaatan sumber daya perikanan yang dilakukan tanpa pengelolaan yang baik akan memberikan dampak yang tidak ramah lingkungan. Penggunaan alat tangkap yang melanggar hukum seperti racun ikan, bom, bius, serta alat yang merusak habitat ikan terjadi karena kurangnya pengetahuan nelayan. Untuk itu diperlukan regulasi yang jelas sesuai kebutuhan dan permasalahan yang terjadi di masing-masing tempat. Penangkapan yang ramah lingkungan merupakan kebijakan pemerintah untuk mengatur ketersediaan sumber daya agar tetap stabil dan terus terjaga. Kriteria alat penangkapan yang ramah lingkungan di antaranya: memiliki selektifitas tinggi, hasil tangkapan sampingan rendah, hasil tangkapan berkualitas tinggi, tidak merusak habitat/ lingkungan, mempertahankan keanekaragaman hayati, tidak menangkap spesies yang terancam punah, tidak mengoperasikan alat tangkap yang membahayakan keselamatan nelayan, serta tidak melakukan penangkapan di daerah terlarang. Untuk itu diperlukan pengelolaan yang baik dalam mencapai pemanfaatan sumber daya perikanan yang berkelanjutan mulai dari membenahi aspek regulasi aturan hukum hingga aturan adat setempat serta melalui kebijakan

pemerintah melalui berbagai program upaya pelestarian sumber daya dan lingkungan (Siombo, 2011: 503).

b. Pengelolaan Sumber Daya Perikanan

Secara hukum formal, danau merupakan sumber daya milik bersama dimana negara diberikan hak untuk mengelola demi kepentingan umum. Setiap orang memiliki hak yang sama untuk memanfaatkan sumber daya tersebut, hal ini berarti privitasasi dan kepemilikan oleh kelompok tertentu tidak diperkenankan. Negara mengatur izin penggunaannya dan tidak ada upaya untuk memiliki dan mengalihkannya (Patittingi, 2012).

Dalam PP Nomor 121 Tahun 2015 tentang Penguasaan Air dijelaskan *“Pengusahaan Sumber Daya Air diselenggarakan berdasarkan rencana penyediaan air dan/atau zona pemanfaatan ruang pada sumber air. Zona pemanfaatan ruang pada sumber air untuk pengusahaan sumber daya air diperhitungkan dengan mengutamakan zona pemanfaatan ruang pada sumber air untuk kelestarian sumber daya air serta kepentingan sosial, budaya, dan hak ulayat masyarakat hukum adat yang berkaitan dengan sumber daya air”*.

Dasar perumusan hukum agraria tidak lepas dari kedudukan hukum adat sebagai aturan istimewa yang telah lama dianut masyarakat Indonesia sejak lama. Hukum adat dikenal dengan istilah hak ulayat yaitu hak yang diberikan kepada masyarakat adat dalam mengelola, memanfaatkan, dan memelihara sumber daya alam di kawasan adat. Hak ulayat hanya untuk menguasai bukan untuk memiliki, dimana masyarakat adat memiliki akses terhadap lahan dan sumber daya alam

yang terkandung di dalamnya. Hak inilah yang membedakan masyarakat asli dengan orang asing dalam kedudukan penguasaan sumber daya alam (Iskandar, 2017).

1) Regulasi hukum

Dalam pengelolaan sumber daya Danau Tempe mengenal istilah model manajemen terpadu. Hal tersebut terlihat dalam aturan yang ada sebagai hasil kompromi dari proses interaksi antara hukum negara dengan hukum adat. Selain itu dilihat dari materi muatannya, Perda ketiga Kabupaten di sekitar Danau Tempe tentang penangkapan ikan merupakan wujud dari hasil dua sistem hukum negara dan hukum adat setempat. Atas dasar sistem normatif perda inilah pengelolaan penangkapan ikan diselenggarakan di Danau Tempe (Saad, 1997).

Setiap kabupaten yang menguasai perairan Danau Tempe telah menetapkan aturan dalam hal pengelolaan sumber daya perairannya, dijabarkan dalam bentuk perda di masing-masing kabupaten meliputi:

- Peraturan Daerah Kabupaten Wajo No. 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Kabupaten Wajo. Dalam perda diatur mengenai tujuh jenis tempat penangkapan ikan, yakni, *bungka toddo*, *palawang*, *cappiang*, sungai atau *salo-salo*, *kalobeng*, *Balete*, dan rawa-rawa. Selain itu juga diatur tentang larangan-larangan dalam pasal 35 ayat 1 sampai 10 yang berbunyi “*Dilarang kepada nelayan merusak rumput-rumputan yang telah dipelihara selama bibit-bibit ikan masih memerlukan perlindungan; Dilarang menjala dengan jala massalebbo; Dilarang majjala dengan sistem jala pacak, karena membunuh anak-anak ikan; Dilarang*

majjala dengan sistem mallewo-lewo (mengepung) di rawa, karena daerahnya terbatas; Dilarang kepada nelayan mempergunakan alat yang sifatnya memaksa ikan keluar dari rumput-rumputan atau dari sarangnya; Dilarang kepada nelayan mempergunakan bunre massampa atau bunre; Dilarang Melakukan aktifitas penangkapan ikan pada malam Jum'at dan hari Jum'at; Nelayan dilarang turun menangkap ikan 3 hari setelah hari raya idul fitri/idul adha dan 3 hari – 3 malam setelah acara Macera Tappareng; Dilarang kepada nelayan mempergunakan bahan-bahan peledak, bahan-bahan racun dan sejenisnya serta penggunaan strom aki; Dilarang memasang jabba di Daerah Danau Tempe dan rawa atau sejenisnya”.

- Peraturan Bupati Soppeng No. 13/Perbup/VI/2012 tentang Tata Cara Pengelolaan Perairan Umum dan *Tappareng Salae* yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Soppeng. Terkait dengan eksistensi *bungka toddo*, diatur pada Pasal 6, yakni:
 - i. Masa pemasangan *bungka toddo* di daerah *palawang* yang dilelang mulai tanggal 1 Juli sampai dengan 31 Desember.
 - ii. Terhadap *palawang* dan daerah yang dibebaskan (*ongkoE, belle barue*, dan daerah bebas *taccipie*) dilarang memasang *bungka toddo* dan alat tangkap yang menetap lainnya, kecuali dalam wilayah konservasi (*reservaat*) dapat dipasang *bungka* sebagai tempat berkembang biaknya ikan dan biota air lainnya oleh petugas yang ditunjuk dari instansi teknis yang menangani fungsi perikanan.

- iii. *Bungka toddo* yang hanyut dari daerah *palawang* yang dilelang, dapat diambil kembali oleh pemilik atau pengelolanya apabila tidak melanggar *belle palawang*.
 - iv. Luas maksimal setiap unit *bungka toddo* 1.000 meter keliling (1.000 lembar *belle*) dan jarak antara *bungka toddo* satu dengan lainnya minimal 200 meter.
 - v. Setiap orang maksimal memiliki 4 unit *bungka toddo*.
 - vi. Hak pengelolaan *bungka toddo* bagi pemajak *palawang* berakhir pada tanggal 31 Desember setiap tahun.
 - vii. Pengelolaan *bungka toddo* di luar masa *palawang* sebagaimana ayat (1) pasal ini yaitu pada tanggal 1 Januari sampai 30 Juni kembali ke Pemerintah Kabupaten Soppeng dan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang No. 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Umum dalam Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang. Dalam Perda ini, bagian-bagian danau dibagi ke dalam 4 bagian sebagaimana Pasal 6, yakni *palawang*, *ongko*, danau bebas, dan *reservat* atau *pacok Belanda*. Perda tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Bupati Nomor 10 tahun 2012 tentang Mekanisme Pemberian Hak Penangkapan Ikan pada Wilayah (*Ongko*) Danau Milik Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Berdasarkan perda masing-masing Kabupaten dan juga diambil dari hukum adat masyarakat yang telah berlangsung sejak dahulu, maka ada beberapa pembagian zona pemanfaatan ruang di Danau Tempe.

Zona pemanfaatan ruang di Danau Tempe terdiri atas zona bebas (*common property*), wilayah hak *ongko* atau *ex ornament* (*sole ownership*), dan zona perlindungan (*reservat*).

2) Aturan informal

Aturan informal merupakan kearifan lokal yang terdiri atas nilai-nilai tradisional yang mengatur kehidupan masyarakat dalam berinteraksi dengan lingkungan alam. Kearifan lokal berperan dalam mengatur perilaku manusia agar lebih arif dalam memanfaatkan alam. Menurut Satria (2020) bahwa pengelolaan sumber daya alam oleh masyarakat (PSM) atau *community-based management* (CBM) berevolusi dan mengikuti perkembangan eksternal seperti agenda global (perubahan iklim dan gender) serta memasukkan instrumen pasar ke dalam sistem lokal. PSM Konservatif (ekologi-sosial tinggi, pasar rendah), yakni model yang menempatkan unsur tradisi dan komunalitas masih kuat dalam pengelolaan sumber daya. PSM Hybrid tinggi (ekologi-sosial tinggi, pasar tinggi), model yang menggabungkan pengelolaan oleh masyarakat dan pengalihan hak pemanfaatan kepada pihak luar. Uniknya, pada model ini pelibatan pihak luar dalam hal ini investor dibatasi atas sumber daya pada area tertentu yang tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat karena keterbatasan teknolog. PSM hybrid rendah (ekologi-sosial rendah, pasar tinggi), yakni pihak pemerintah desa mengundang investor untuk membeli hak pemanfaatan sumber daya dengan cara lelang atas area perairan tertentu yang dilindungi dalam waktu tertentu. PSM status quo (ekologi-sosial rendah, pasar rendah), yakni model yang tidak adaptif terhadap perubahan

sosio-ekonomi-ekologi sehingga budaya pudar dari praktik pengelolaan sumber daya alam yang berdampak pada melemah bahkan hilangnya praktik PSM di masyarakat.

3) Kebijakan pemerintah

Berdasarkan data Kementerian PUPR (2019), pemerintah pusat telah menganggarkan untuk melakukan pengerjaan proyek peremajaan 15 danau yang telah mengalami krisis lingkungan. Program yang diberi nama revitalisasi danau bertujuan untuk mengembalikan fungsi alami danau melalui teknikalisis berupa pengerukan sedimen dasar danau, pembuatan tanggul, dan penataan kawasan daerah aliran sungai. Pada tahun 2016 telah mulai dilaksanakan pada 10 danau kritis meliputi Danau Toba (Sumut), Danau Maninjau (Sumbar), Danau Kerinci (Jambi), Danau Rawa Pening (Jateng), Danau Kaskade Mahakam (Kaltim), Danau Tondano (Sulut), Danau Limboto (Gorontalo), Danau Sentani (Papua), Danau Poso (Sulteng), dan Danau Tempe (Sulsel).

Langkah-langkah strategis pemerintah pusat dalam program revitalisasi danau meliputi beberapa tahap. Pertama, pemerintah melaksanakan proyek penyelamatan danau yang telah dimulai pada tahun 2018 dengan melakukan pengerukan untuk mengatasi pendangkalan. Kedua, memasukkan rencana program tersebut ke dalam RPJMN sebagai perencanaan jangka menengah nasional. Ketiga, melakukan kerjasama dengan berbagai pihak dalam pengerjaan proyek dan pengelolaan danau. Keempat, mendukung pelaksanaan hingga monitoring dan evaluasi program revitalisasi danau. Khusus di Danau Tempe, pemerintah telah menyelesaikan pembangunan bendung gerak

di hilir danau sejak tahun 2015. Menurut pemerintah bendung ini berfungsi untuk mempertahankan elevasi permukaan air danau sekaligus sumber air PDAM. Sementara pada tahun 2019 pemerintah telah menyelesaikan proyek pengerukan danau dan pembangunan pulau buatan yang tersebar di beberapa kecamatan. Tiga di antaranya berada di Kecamatan Tempe dan Tanasitolo Kabupaten Wajo, beberapa tersebar di Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng, dan sisanya di Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidrap (Kementerian PUPR, 2015).

2. Karakteristik Nelayan (*Pa'jabba* dan *Pa'bungka*)

Masyarakat nelayan sangat lekat dengan sumber daya perikanan dengan bentuk kegiatan penangkapan ikan maupun budidaya perikanan di wilayah perairan (danau, sungai, dan rawa). Menurut Kusnadi (2009), nelayan adalah sekelompok orang yang mulai tumbuh dan berkembang di kawasan pesisir yang memanfaatkan sumber daya sekitarnya. Pada akhirnya mereka membentuk suatu sistem masyarakat dengan kategori sosial dan kesatuan sosial, yang memiliki kebudayaan baik itu sistem nilai dan simbol dalam mengatur tingkah laku keseharian mereka

Penggolongan sosial masyarakat nelayan dapat dilihat dari segi penguasaan alat tangkap, modal, dan teknologi. Masyarakat nelayan berdasarkan penguasaan alat tangkap yaitu nelayan yang bertindak sebagai pemilik alat-alat produksi (perahu, jaring, dan sebagainya) dan nelayan buruh yang tidak memiliki alat tangkap. Sementara dari segi modal terdapat nelayan dengan kategori nelayan besar dan nelayan

kecil. Dari segi penggunaan teknologi terbagi menjadi nelayan modern dan nelayan tradisional (Kusnadi, 2009).

Pola hubungan antar masyarakat nelayan umumnya mengenal istilah patron-klien. Pada kelompok nelayan berskala besar, *punggawa* bertindak sebagai patron dan *sawi* sebagai klien. *Punggawa* sebagai pemilik, investor dan menguasai semua alat-alat produksi. Sedangkan *sawi* yaitu nelayan yang bekerja untuk *punggawa*. Status sosial *punggawa* termasuk nelayan kelas atas yang menggunakan modal besar dan tidak jarang menguasai suatu wilayah penangkapan yang luas. Hubungan dengan *sawi* terkadang bersifat tertutup dengan relasi kekerabatan yang kuat. *Punggawa* juga biasanya memberikan pinjaman ke *sawi* dalam menjamin tanggungan hidupnya (Koeshendrajana dkk, 2007).

Hubungan patron-klien pada kelompok nelayan skala kecil lebih bersifat terbuka. *Punggawa* biasanya seseorang yang memimpin pengelolaan perahu dan umumnya memiliki perahu dan peralatan tangkap. Nelayan *Sawi* bekerja pada seorang *punggawa* mengandalkan tenaganya. Status sosial *punggawa* termasuk nelayan kelas menengah sedangkan *sawi* merupakan nelayan kecil dan tergolong miskin (Akhmar, 2007). Bandar ikan termasuk *punggawa* yang memberikan bantuan modal. Meskipun tidak ada jaminan sosial yang diberikan oleh *punggawa* bandar ikan, namun nelayan kecil memiliki kewajiban menyerahkan hasil tangkapannya oleh bandar yang harganya ditentukan secara sepihak (Priyatna dan Sumartono, 2011:42-43).

Dalam pemanfaatan sumber daya perikanan di Danau Tempe nelayan menggunakan berbagai alat tangkap mulai dari jaring hingga perangkap ikan. Nelayan dikenal dengan istilah *pakkaja*, sedangkan proses menangkap ikan disebut dengan *makkaja*. Istilah nelayan atau *pakkaja* merupakan penyebutan bagi nelayan secara umum sementara secara spesifik penamaan nelayan mengikuti penyebutan nama alat tangkap yang digunakan. Nelayan yang menggunakan jala (*cast net*) disebut sebagai *pakkaja jala*. Nelayan yang menggunakan lanra (*gillnet*) disebut sebagai *pa'lanra*. Begitupun dengan *pa'jabba* yaitu nelayan yang menggunakan alat tangkap yang dikenal sebagai *jabba (fish trap)*. *Jabba* merupakan perangkap ikan yang dipasang nelayan di sekitar danau berukuran persegi panjang dan dimodifikasi. Khusus di Danau Tempe, nelayan danau menerapkan cara unik dalam menangkap ikan yaitu menggunakan tanaman air seperti eceng gondok yang disebut sebagai *bungka toddo*. Prinsip kerja *bungka toddo* mirip seperti rumpon (*fish aggregating device*) di laut yang berupaya menciptakan tempat perlindungan bagi ikan-ikan berkumpul agar lebih mudah ditangkap. Nelayan danau yang menggunakan *bungka toddo* disebut sebagai *pa'bungka* (AIFDR, 2015).

Suriadi dkk (2015) menjelaskan perbedaan persepsi nelayan mengenai ketinggian air danau. Beberapa kelompok nelayan menginginkan air surut pada musim kemarau sedangkan beberapa lainnya menginginkan air tetap tinggi. Dengan adanya bendung gerak yang ditutup pada musim kemarau membuat nelayan yang menginginkan air surut memaksa membuka pintu air bendung tersebut.

Namun dalam penelitian ini tidak dijelaskan kelompok nelayan yang dimaksud.

3. Danau dan Pengembangan Perikanan Darat

Sejauh ini, pemenuhan kebutuhan ikan untuk konsumsi berasal dari perikanan tangkap di laut dan budi daya ikan air tawar. Upaya menggenjot produksi ikan sekarang ini tidak bisa mengandalkan perikanan tangkap. Data produksi perikanan laut 2012 mencapai 5,8 juta ton. Angka tersebut berarti mendekati ambang batas penangkapan ikan dari potensinya di laut Indonesia sebesar 6,4 juta ton setiap tahun. Jika mendorong penangkapan ikan laut lebih besar maka berimplikasi terhadap pengelolaan perikanan yang tidak berkelanjutan. Indonesia perlu mencari jalan keluar untuk mengatasi persoalan pemenuhan ikan. Salah satu solusi yang bisa ditempuh dengan peningkatan budi daya ikan air tawar melalui tambak di pinggir pantai atau di daratan, yaitu *marine culture* (budidaya di laut), *aqua culture* (pesisir pantai), dan potensi perairan di persawahan atau danau (LIPI, 2013).

Danau merupakan perairan yang potensial dalam pemenuhan ikan namun terdapat berbagai permasalahan lingkungan yang mengancamnya. Tata ruang dan pembuangan limbah industri maupun pertanian menjadi persoalan yang dihadapi danau-danau di Indonesia. Penebangan hutan dan pengolahan tanah di sekitar danau untuk lahan pertanian berakibat erosi di wilayah daerah aliran sungai (DAS) yang membawa sedimen ke danau. Akibatnya, tidak sedikit danau yang mengalami pendangkalan. Menurut Haryani (2006), pendangkalan yang terjadi di danau berdampak pada berkurangnya ruang hidup ikan di

lahan basah tepian danau dan peningkatan suhu kumulatif memusnahkan tempat pemijahan ikan. Berkurangnya luasan danau yang dangkal menyebabkan hilangnya sebagian besar habitat karena dapat kehilangan elemen ekologi penting disebabkan oleh fluktuasi air. Belum lagi permasalahan pencemaran air di danau yang berdampak terhadap penurunan kualitas air danau. Ujung-ujungnya, musnahnya organisme air yang berperan sebagai mata rantai makanan ikan seperti fitoplankton, zooplankton, dan bentos. Selain itu, danau sebagai perairan tawar mengalami eksploitasi perikanan dan mekanisasi transportasi air. Keseluruhan ekosistem danau mengalami dampak akibat aktivitas manusia.

Perlunya manajemen berbasis risiko dan dampak bencana pada danau-danau di seluruh Indonesia, antara lain melalui pemantauan secara *online & real time*, dan melakukan pembangunan Sistem Peringatan Dini pada 15 danau prioritas di Indonesia, khususnya terhadap bencana ekologis ekonomi dan peningkatan kapasitas kesiapsiagaan dan pengurangan risiko pada masyarakat yang bergantung pada ekosistem danau berupa pelatihan bencana dan pemberdayaan melalui ketrampilan dalam kegiatan produktif yang selaras dengan jasa lingkungan. Manajemen danau dilakukan dengan mengidentifikasi bahaya eksternal yang mengancam, memetakan kerentanan (fisik, kimia, biologis, sosial ekonomi, dan kelembagaan) yang terpapar terhadap bahaya, estimasi risiko dan dampak yang timbul bila bahaya berubah menjadi bencana, dan meningkatkan kesiapsiagaan guna mengurangi risiko dan dampak kehilangan nyawa dan kerugian

aset. Dalam konteks pemansan global dan perubahan iklim, berbagai kegiatan konservasi lingkungan dan pengurangan risiko bencana diintegrasikan dengan serangkaian kegiatan yang bersifat mitigasi dan adaptasi. Dengan demikian diharapkan masalah kerusakan ekosistem danau dapat dikurangi bahkan dihindari, sesuai batas kemampuan daya dukung ekosistem untuk keberlanjutan kehidupan manusia di bumi (Haryani, 2014: 18).

Musdah dan Husain (2014) yang melihat persoalan banjir Danau Tempe dari sisi kebijakan tata ruang. Yang menurutnya dalam peraturan daerah mengenai rancangan tata ruang wilayah ketiga Kabupaten (Wajo, Soppeng, dan Sidenreng Rappang) telah adanya upaya untuk mengatasi persoalan banjir. Sedangkan dalam penelitian Mustamin (2016) memperlihatkan bahwa tradisi *maccera' tappareng* di Danau Tempe berperan menjaga ekosistem danau melalui pranata-pranata lokal yang telah berlangsung lama.

4. Teori Akses dalam Pendekatan Ekologi Politik

Perkembangan pendekatan ekologi politik tidak terlepas dari kritik terhadap pendekatan ekologi manusia yang memandang hubungan manusia dengan lingkungannya. Ekologi manusia sering kali mengabaikan proses-proses ekonomi politik yang mempengaruhi adaptasi manusia terhadap perubahan lingkungannya. Padahal proses dan interaksi antar manusia dengan alam selalu ada faktor-faktor politik dan ekonomi yang bekerja diantaranya (Abdoellah, 2020: 177).

Menurut Robbins dalam Abdoellah (2020), ekologi politik merupakan pendekatan yang memandang ketimpangan akses dan kuasa

berbagai aktor dalam memanfaatkan lingkungan beserta dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. Ekologi politik mempelajari hubungan timbal balik antara masyarakat manusia yang terstruktur secara ekonomi politik dengan lingkungannya. Manusia dan kebudayaannya tidak bisa dipisahkan dengan alam sebagaimana cara pandang Cartesian tentang dualisme sosial-fisik.

Blaikie dan Brookfield (1987) menjelaskan bagaimana manusia dan lingkungannya saling mempengaruhi dengan cara yang dialektis. Dalam memandang kerusakan lingkungan akibat ulah manusia, masyarakat tidak bisa dilihat sebagai kelompok tunggal. Justru ada berbagai kelompok dengan struktur ekonomi dan politik yang menyebabkan ketimpangan akses terhadap sumber daya. Orang-orang yang memiliki akses yang paling terbatas justru orang-orang yang berada pada struktur sosial bawah yang rentan secara ekonomi dan lemah secara politik. Inilah yang disebut sebagai konsep marginalisasi. Pada akhirnya kerusakan lingkungan akibat proses-proses ekonomi politik dan ketimpangan akses sumber daya akan semakin menyingkirkan mereka yang termarginalkan.

Pada akhirnya kunci dari memahami ekologi politik dengan memfokuskan pada aspek akses dan kuasa berbagai aktor dalam kaitannya dengan perubahan lingkungan. Perbedaan-perbedaan dalam politik, sosial, dan ekonomi berperan dalam ketimpangan manfaat sekaligus menjadi kerugian bagi masyarakat dan lingkungan (Abdoellah, 2020: 176-177).

a. Teori Akses

Berbicara tentang akses lebih dari sekedar membicarakan siapa yang memiliki hak terhadap properti atau sumber daya, melainkan apa yang dimaksud Ribot dan Peluso (2003) sebagai “*the ability derive benefits from things*” yang berarti kemampuan untuk memperoleh manfaat dari sumber daya alam terlepas dari apakah mereka memiliki hak atau tidak. Akses juga dapat diaktifkan secara tidak langsung untuk memberikan hak kepada praktik yang sebelumnya ilegal atau tidak disetujui secara hukum, adat, atau persetujuan, meski tidak diakui oleh pemerintah atau sebagian masyarakat, namun akses memungkinkan para aktor memanfaatkan kekuatan atau kekuasaannya untuk memenangkan persaingan sumber daya alam. Beragam cara, hubungan sosial, hingga proses-proses yang membatasi dan memungkinkan aktor mendapat keunggulan dari aktor lainnya, inilah yang disebut akses sebagai “*bundle and webs of power*”.

Akses bukanlah soal pembagian kelas ala marxisme tetapi lebih kepada upaya kekuasaan relasional untuk memenangkan persaingan antara aktor lainnya. Dalam upaya tersebut setiap aktor saling menutupi akses aktor lainnya (*enclosure*), inilah yang kemudian disebut Hall, Hirsch, dan Li (2011) sebagai eksklusi. Proses eksklusi kemudian dibenarkan melalui bentuk-bentuk relasi kuasa seperti peraturan, pemaksaan, pasar, dan legitimasi moral (Batubara, 2017).

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, jaringan akses dan kekuasaan sebagai proses-proses untuk mendapatkan, memelihara, dan mengontrol akses pemanfaatan sumber daya alam. Mengontrol

berarti kemampuan untuk memediasi akses orang lain, sedangkan memelihara akses berarti mengeluarkan sejumlah sumber daya untuk menjaga agar akses tetap terbuka. Mekanisme dalam mendapatkan hingga memelihara dan mengontrol akses meliputi klaim atas hak dan akses berbasis struktural dan relasional. Klaim atas hak dapat berupa pengakuan secara hukum, adat, maupun konvensi. Adapun mekanisme akses berbasis struktural dan relasi diantaranya teknologi, modal, pasar, tenaga kerja, pengetahuan, otoritas, identitas, dan hubungan sosial. Penting juga untuk mengetahui hubungan-hubungan kekuasaan yang mendasari mekanisme akses (Ribot dan Peluso, 2003).

Dalam memandang bagaimana pemanfaatan sumber daya perikanan dimanfaatkan oleh masyarakat nelayan, setidaknya ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan. Pertama, perlu kita ketahui bahwa manusia dalam berusaha memanfaatkan alam yang ada disekitarnya didorong oleh adanya kebutuhan hidup. Sebagai makhluk sosial dalam keterbatasan individu mendorong manusia untuk berkelompok dalam mengelola sumber daya alam. Hal ini menciptakan kelompok-kelompok masyarakat pada ruang yang sama yang kemudian saling bersaing mendapatkan sumber daya alam yang sama pula. Namun kenyataannya selain kontestasi antar kelompok masyarakat tersebut juga terdapat negara sebagai aktor politik dan aktor-aktor ekonomi dalam sistem ekonomi kapitalis dan neoliberalisme (Wilson dan Swyngedouw, 2014).

Sumber daya perikanan merupakan bagian dari lingkungan sedangkan masyarakat yang memanfaatkan dan mengelolanya

mempunyai sistem nilai budaya yang mengatur pola pikir dan tata kelakuan individu-individu warga masyarakat tersebut. Kebudayaan setiap masyarakatlah yang menentukan bagaimana mereka melihat dan memahami lingkungan alam dan fisik di sekitarnya. Selain itu kebudayaan yang dimiliki manusia yang akan menjadi landasan mereka dalam menggolongkan unsur-unsur lingkungan yang ada di dalamnya (Febrianto, 2016: 67-68).

Menurut Cortner dalam Abdoellah (2020), manusia dan kebudayaannya tidak bisa dipisahkan dengan alam sebagaimana cara pandang Cartesian tentang dualisme sosial-fisik. Pendekatan ekologi manusia merupakan cara memahami hubungan dialektis manusia dengan lingkungan fisik alamiah sebagai satu kesatuan. Ekologi manusia berfokus pada hubungan antara berbagai komponen dalam ekosistem termasuk aspek sosial, politik, ekonomi, biologi, dan kondisi lingkungan fisik dalam upaya memahami interaksi antar komponen tersebut. Jadi hubungan timbal balik tersebut harus dipahami secara holistik yang dimana manusia bukanlah bagian yang terpisahkan dari ekosistemnya sehingga manusia harus mengupayakan budaya baru yang memiliki tanggung jawab moral terhadap lingkungan.

Blaikie dan Brookfield (1987) menjelaskan bagaimana manusia dan lingkungannya saling mempengaruhi dengan cara yang dialektis. Dalam memandang kerusakan lingkungan akibat ulah manusia, masyarakat tidak bisa dilihat sebagai kelompok tunggal. Justru ada berbagai kelompok dengan struktur ekonomi dan politik yang menyebabkan ketimpangan akses terhadap sumber daya. Orang-orang

yang memiliki akses yang paling terbatas justru orang-orang yang berada pada struktur sosial bawah yang rentan secara ekonomi dan lemah secara politik. Inilah yang disebut sebagai konsep marginalisasi. Pada akhirnya kerusakan lingkungan akibat proses-proses ekonomi politik menyebabkan ketimpangan akses sumber daya.

b. Model berbasis aktor

Dalam proses persaingan antar aktor, aktor tingkat bawah yaitu masyarakat saling bersaing begitupun dengan aktor ekonomi yaitu pasar dan negara sebagai aktor politik (Forsyth, 2003). Aktor negara sebagai pelindung justru juga memiliki kepentingan sebagai pengguna sumber daya. Hal ini tidak terlepas dari aktor pasar misalnya perusahaan multinasional yang memiliki kepentingan yang sama dengan negara dalam memperlancar eksploitasi sumber daya alam. Sementara di sisi lain masyarakat terkadang tidak dilibatkan dalam upaya pengelolaan sumber daya alam. Hal tersebut lantaran masyarakat selalu dianggap sebagai aktor perusak lingkungan (Satria, 2020).

Mengapa masyarakat terkadang mengeksploitasi sumber daya alam ke tahap yang dinilai tidak berkelanjutan? Untuk menjawab persoalan ini dalam ekologi manusia dikenal dengan konsep eksploitasi struktural. Dalam memanfaatkan sumber daya, masyarakat sebagai produsen dituntut terus mengeksploitasi semua faktor produksi yang dimiliki sebagai akibat dari berbagai tekanan-tekanan pasar maupun negara melalui hubungan-hubungan produksi dan pertukaran (Blaikie, 1985). Sebagai contoh petani yang harus memaksimalkan hasil lahan akibat tingginya biaya-biaya produksi (pupuk, benih, dan pestisida). Di

sisi lain petani harus bersaing dengan bisnis impor hasil pertanian hingga kebijakan negara dalam menekan harga. Hal ini mendorong terjadinya degradasi lahan sebagai hasil dari proses-proses yang telah berlangsung (Bernstein, 2010).

Kendati bahwa masyarakat yang mengelola sumber daya alam dengan tidak berkelanjutan, namun kenyataannya sistem ekonomi kapitalis bekerja di dalamnya. Masyarakat yang dianggap penyebab kerusakan lingkungan padahal masyarakat menerapkan praktek-praktek tradisional yang sesungguhnya ramah lingkungan (Forsyth, 2003) Justru prinsip kapitalisme yang menggunakan sumber daya alam paling besar untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya yang merusak lingkungan, sebab ongkos lingkungan tidak dimasukkan dalam perhitungan untung rugi dan dianggap tidak menguntungkan (Abdoellah, 2020). Inilah yang disebut Scott (1981) sebagai moral ekonomi yaitu etika subsisten dalam mengelola sumber daya serta konsep mengenai keadilan. Jadi nilai-nilai masyarakat tradisional justru menjaga keberlangsungan sumber daya alam, bukan upaya mereduksi semua hal semata-mata ke dalam mekanisme pasar dan menempatkan lingkungan sebagai ruang bisnis yang tidak berkelanjutan.

Model berbasis aktor (*actor based model*) dalam upaya memahami hubungan manusia dan lingkungan merupakan cara pandang yang melihat proses pengambilan keputusan individu dalam menghadapi dan berinteraksi dengan lingkungan alam. Dari perspektif ini, tingkatan di atas organisasi, apakah komunitas, ekosistem, atau sistem sosial manusia, ada hanya sebagai hasil interaksi yang tidak disengaja di

antara banyak organisme individu. Oleh karena itu, dalam kasus masyarakat manusia, upaya dan strategi (adaptasi) bukan pada tingkat budaya atau sistem sosial, melainkan sebagai hasil dari ribuan keputusan individu tentang cara terbaik untuk berinteraksi dengan lingkungan (Rambo, 1983: 18-19). Individu diasumsikan terus membuat pilihan tentang bagaimana mengeksploitasi sumber daya yang tersedia sambil menghadapi bahaya lingkungan. Mereka yang membuat pilihan yang "menguntungkan" akan berusaha bertahan dan berkembang sedangkan mereka yang memilih kurang bijak berusaha melawan. Seiring waktu, strategi adaptif yang lebih berhasil akan dilembagakan sebagai norma budaya.

Model berbasis aktor, dengan penekanannya pada proses yang dilakukan orang membuat keputusan tentang bagaimana berinteraksi dengan lingkungan mereka, merupakan pendekatan yang berharga untuk memahami bagaimana perubahan terjadi dalam sistem sosial sebagai tanggapan gangguan lingkungan. Pendekatan ini sangat berguna untuk wawasan yang diberikannya mengapa masyarakat tradisional menerima atau menolak inovasi. Meskipun model ini telah digunakan secara berguna dalam menjelaskan pilihan nelayan tentang hubungan lingkungan, ia bergantung pada atas serangkaian asumsi yang dipertanyakan tentang manusia dan masyarakat. Fakta bahwa nelayan mampu memilih salah satu dari dua alat tangkap yang akan memberikan hasil optimal dalam kondisi lingkungan setempat tidak dapat dijadikan bukti bahwa manusia pada umumnya selalu atau bahkan biasanya membuat keputusan yang tepat tentang interaksi mereka

dengan lingkungan. Dalam asumsinya bahwa manusia selalu berperilaku rasional, model berbasis aktor menjelaskan aktor nelayan biasanya membuat keputusan mereka dengan cara yang rasional secara ekologis. (Vayda dan McCay, 1975) , khususnya memiliki menyangkal pandangan teoritis sebelumnya bahwa populasi lokal yang beradaptasi dengan ekosistem, sekarang tampaknya mengambil posisi bahwa individu dalam masyarakat tradisional umumnya membuat keputusan yang "benar" tentang penggunaan alam sumber daya sehingga jumlah dari keputusan ini mempromosikan hubungan lingkungan yang stabil.

Sementara tidak ada antropolog yang meragukan bahwa masyarakat tradisional seringkali memiliki keakuratan dan pengetahuan lingkungan yang mendetail, yang memungkinkan mereka membuat keputusan rasional tentang penggunaan sumber daya dan mengatasi bahaya alam, harus demikian sangat menekankan bahwa tidak ada persyaratan yang melekat bahwa hasil seperti itu bisa terjadi. Dalam banyak situasi, seperti "*the tragedy of the commons*" yang dijelaskan oleh Hardin (1968), efek ringkasan dari keputusan individu, yang semuanya rasional dari sudut pandang masing-masing aktor, adalah menghancurkan daya dukung lingkungan, sehingga menurunkan kesejahteraan secara keseluruhan masyarakat.

Bahkan tidak valid untuk mengasumsikan bahwa individu selalu membuat pilihan adaptif yang rasional dalam kaitannya dengan kepentingan diri jangka pendek mereka. Keputusan mereka mungkin benar atau mungkin salah dalam konteks nilai budaya mereka, tetapi mereka sebagai individu tidak menciptakan nilai-nilai ini. Sebaliknya,

nilai-nilai adalah aspek yang sudah ada sebelumnya dari sistem sosial tempat individu-individu ini dilahirkan. Sebagai anak-anak mereka disosialisasikan untuk menerima nilai-nilai ini sebagai benar, dan sebagai orang dewasa mereka membuat pilihan tentang interaksi dengan lingkungan dalam kaitannya dengan nilai-nilai itu.

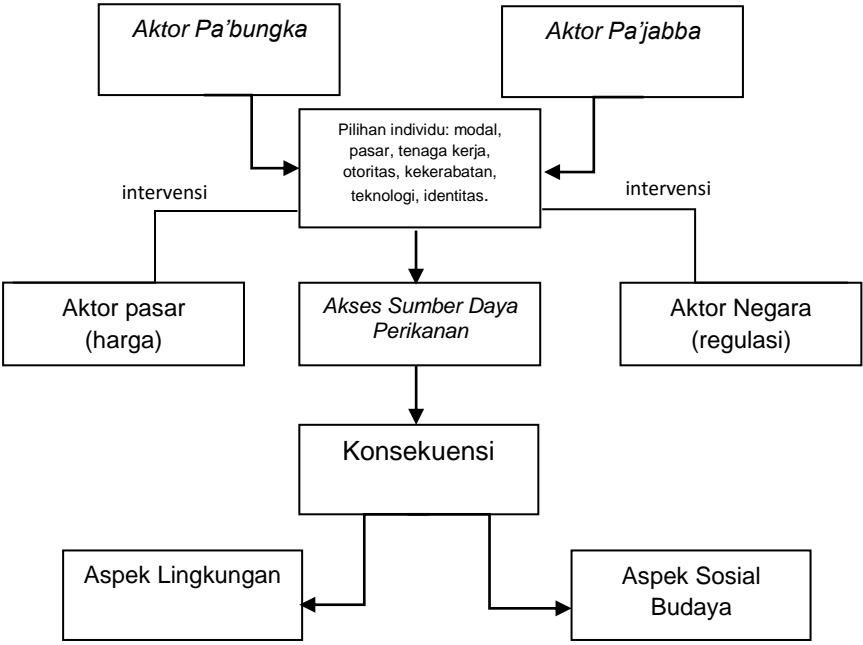
Menurut Bryant dan Bailey (1997) menggunakan pendekatan berorientasi aktor membantu menggambarkan kompleksitas hubungan kekuasaan antara para aktor dalam persoalan lingkungan. Kekuasaan yang dimaksud tercermin melalui kemampuan aktor dalam mengontrol akses ke sumber daya alam, mengarahkan sumber daya tersebut ke proyek-proyek tertentu tapi tidak ke yang lain, hingga berupaya mengatur representasi diskursif dari perubahan lingkungan yang terjadi. Setiap aktor memiliki kepentingan yang berbeda dengan kompleksitas yang terjadi melalui interaksi antar aktor dan lingkungan. Berdasarkan perbedaan kepentingan antar aktor menciptakan konflik persaingan baik antar aktor dalam kategori yang sama maupun antar individu dengan aktor kategori lainnya, meskipun tidak jarang antar aktor juga berkembang koalisi dan aliansi berdasarkan sifat dan kepentingan yang berbeda. Dalam hal ini wacana berperan penting dalam mengkondisikan kontestasi politik ekologis pemanfaatan sumber daya alam. Seperti yang diungkapkan Foucault (1980), kekuasaan dipraktekkan terakumulasi lewat pengetahuan, melalui wacana (gagasan, konsep, efek) proposisi-proposisi yang dianggap benar diproduksi. Hal ini untuk menata, mengatur, dan mengontrol individu-individu atau aktor-aktor lain sesuai dengan kehendak aktor penguasa.

Berkaitan dengan akses nelayan dalam pemanfaatan sumber daya perikanan Danau Tempe, Karlsson (2015) menyarankan studi ekologi politik tidak terbatas hanya pada kontestasi sumber daya lahan seperti kebanyakan. Namun penelitian ini diharapkan juga melihat persoalan-persoalan lainnya seperti akses sumberdaya perairan, udara, hingga permasalahan di perkotaan. Untuk itu, penelitian ini mengambil topik sumber daya perikanan dimana relasi kekuasaan berkaitan akses terhadap sumber daya dapat memperlihatkan bagaimana masyarakat melalui aspek kulturalnya dapat bertahan dan mendapatkan manfaat dari sumber daya perikanan. Pada akhirnya proses yang berlangsung tersebut berakibat pada perubahan lingkungan secara dialektis berdampak pada kehidupan sosial budaya masyarakat. Jadi untuk menjawab persoalan tersebut, penelitian ini menggunakan teori akses Ribot dan Peluso (2003) dengan pendekatan berorientasi aktor sehingga mampu menjelaskan hal-hal yang berhubungan dengan manusia dan lingkungannya dari sudut pandang ilmu Antropologi.

B. Alur Pemikiran

Penelitian ini memiliki konsentrasi pada proses akses antara nelayan yang menggunakan perangkap ikan (*pa'jabba*) dan nelayan yang menggunakan *bungka toddo* (*pa'bungka*) dalam hal mengakses sumber daya perikanan Danau Tempe. Model berbasis aktor digunakan dalam melihat berbagai mekanisme akses yang dipraktekkan oleh setiap nelayan. Relasi kekuasaan yang mendasari akses tersebut menjadi kunci dominasi atas sumber daya, terutama relasi aktor negara dan aktor pasar. Terakhir, proses-proses politik ekonomi yang berlangsung dikaitkan

dengan perubahan lingkungan dan implikasi sosial budaya yang ditimbulkan. Berikut gambaran alur pemikiran dalam penelitian ini:



→ Pengaruh
— Intervensi